# Kepentingan Papua Nugini Terhadap Penyelenggaraan

**KTT *APEC* 2018**

**Ahmad Irfan1**

***Abstract:*** *This research examines the national interests of Papua New Guinea in the APEC Summit 2018. A large budget is inversely proportional to the weak economic situation in 2018 and budget cuts which resulted in poor public services then raises the question why did Papua New Guinea decide to host the APEC summit 2018. The purpose of this research is to explain what are the interests of Papua New Guinea to host APEC Summit 2018. This research uses qualitative research method with explanative technique. The theory used in this research is decision making with the rational actor model by Graham T Allison. The results of this study indicate that the reasons for Papua New Guinea to decide to remain the host of the APEC Summit are based on economic and political interests by considering the potential advantages and disadvantages of holding this event which the potential economic benefits are considered to be greater than the costs of organizing the event.*

***Keywords: APEC Summit 2018, Decision Making, Papua New Guinea.***

# Pendahuluan

Pada tahun 2018, Papua Nugini terpilih menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018. Papua Nugini telah menyatakan niatnya untuk menjadi penyelenggara *event* tersebut pada tahun 2011 dan kemudian terpilih menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018 pada penyelenggaraan KTT *APEC* 2013 di Bali, Indonesia. Perlu diketahui bahwa KTT *APEC* merupakan pertemuan tahunan para pemimpin ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam forum *APEC* untuk membahas isu-isu dan kerjasama ekonomi.

Keputusan Papua Nugini tersebut mendapatkan sambutan baik dari beberapa negara- negara anggota *APEC* seperti Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Indonesia dan Selandia Baru, dengan alasan bahwa Papua Nugini belum pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut dan Papua Nugini memiliki potensi investasi yang besar di bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Negara-negara tersebut kemudian berinisiatif membantu Papua Nugini menyelenggarakan KTT *APEC* 2018.

Namun keputusan Papua Nugini menjadi tuan rumah KTT *APEC* menimbulkan permasalahan, ketika negara ini mengalami pelemahan ekonomi yang mulai terjadi sejak tahun 2015. Anjloknya harga komoditas tambang dan kurangnya permintaan komoditas yang menjadi tumpuan utama perekonomian negara tersebut, serta perlambatan ekonomi global telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Papua Nugini pada tahun 2015 mencapai 9,5%, kemudian turun menjadi 4,1% di tahun 2016, kemudian turun lagi menjadi 3,5 % di tahun 2017 dan anjlok menjadi – 0,8 % di tahun 2018. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Papua Nugini kemudian menimbulkan defisit anggaran yang cukup besar, yaitu mencapai 2,5 % dari PDB atau sekitar 1.987 juta Kina, hal itu juga berdampak pada peningkatan rasio utang negara terhadap PDB yang cukup signifkan, yaitu dari 25% di tahun 2012 menjadi 36,9%

1 Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ahmadtheirfan@gmail.com

di tahun 2018.

Kondisi perekonomian yang terbilang sulit tersebut membuat penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan seperti masyarakat, anggota parlemen, pengamat, dan salah satu gubernur di Papua Nugini. Respon negatif tersebut berupa kritik yang disampaikan melalui media massa, mereka menganggap kegiatan tersebut tidak tepat dilaksanakan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami*. IMF* memperkirakan penyelenggaraan KTT *APEC* di Papua Nugini menghabiskan sekitar 3 miliar Kina (US$1 miliar) atau setara dengan 7% dari total anggaran pemerintah dalam periode yang sama. Biaya penyelenggaraan KTT tersebut pun setara dengan anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan sebesar 3,5 miliar Kina dan 3,7 miliar Kina.

Anggaran penyelenggaraan KTT *APEC* yang terbilang besar tersebut justru kontras terhadap anggaran-anggaran di bidang lain yang mengalami pemangkasan sejak tahun 2015, terutama anggaran untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang masing-masing mengalami pemangkasan sebesar 17% dan 30%. Pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan dan menimbulkan permasalahan yang serius di kedua bidang tersebut sehingga memunculkan demonstrasi oleh masyrakat Papua Nugini.

Melihat kondisi perekonomian yang rendah dan pelayanan masyarakat yang buruk, seharusnya Pemerintah Papua Nugini lebih memprioritaskan perbaikan ekonomi dan peningkatan layanan terhadap masyarakat dengan mengundurkan diri sebagai tuan rumah KTT *APEC* 2018 dan kemudian mengalihkan anggaran yang terbilang besar tersebut ke sektor-sektor vital yang telah mengalami pemangkasan sejak tahun 2015, namun nyatanya Papua Nugini memutuskan untuk tetap menyelenggarakan KTT *APEC* 2018.

# Kerangka Teori

**Teori Pengambilan Keputusan**

Teori pengambilan keputusan adalah teori yang sering digunakan dalam pembahasan kebijakan luar negeri sebuah negara. Kebijakan luar negeri sendiri merupakan instrument yang penting bagi sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Mohtar Mas’oed berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah akibat dari tindakan aktor rasional dalam sistem pemerintahan yang monolit dan dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. (Mas’oed Mohtar, 1990)

Dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan perlu melakukan sebuah analisis dengan melihat faktor domestik maupun eksternal. Selain itu, kepentingan nasional menjadi prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional menjadi tolak ukur para pembuat keputusan sebelum merumuskan dan menetapkan sikap. Adapun kepentingan nasional itu terdiri atas kepentingan keamanan nasional, kepentingan ekonomi, kepentingan peningkatan kekuatan nasional, dan kepentingan politik. Graham T Allison menjelaskan 3 model yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang antara lain adalah: ( Allison, 1969)

Model Proses Organisasi (*The Organizational Process*), dalam model ini kebijakan diambil berdasar pada organisasi yang berada dalam suatu negara, model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistis yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

Model Politik Birokratik *(Bureaucratic/Governmental Politics),* Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar

menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar *stakeholder* terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.

Model aktor rasional, dalam model ini, negara merupakan aktor individu dalam pembuatan kebijakan. Asumsi rasional dalam model ini bukan hanya merupakan perilaku cerdas dari aktor, melainkan juga perilaku yang dimotivasi oleh perhitungan keuntungan yang cermat. Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Sistem pengambilan keputusan diambil oleh kepala pemerintahan dengan didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan *prudent*.

Dalam model aktor rasional, ada 4 indikator yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, yaitu adanya aktor nasional sebagai pengambil kebijakan luar negeri. Kedua, menentukan *goal* yang ingin dicapai. Ketiga, dilakukannya analisa dan identifikasi masalah secara jelas. Keempat, adanya perhitungan nilai dari alternatif-alternatif kebijakan, dalam hal ini aktor akan mempertimbangkan beberapa tindakan yang relevan dengan masalah dan salah satu dari beberapa pilihan itu akan menjadi solusi. Terakhir, menentukan pilihan keputusan berdasarkan *value maximizing*.

# Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif, untuk menjelaskan mengenai kepentingan Papua Nugini terhadap penyelenggaraan KTT *APEC* 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *literature review* berupa Jurnal, Buku, dan berita-berita dari media cetak dan elektronik yang kredibel dan terpercaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik telaah pustaka yang kemudian dianalis menggunakan metode kualitatif.

# Hasil dan Pembahasan

KTT *APEC* menjadi salah satu event ekonomi yang menghabiskan banyak anggaran bagi negara penyelenggaranya. Sebagai contoh, penyelenggaraan KTT *APEC* di Tiongkok pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sebesar $ 6 miliar, sementara itu, KTT *APEC* di Filipina tahun 2015 sebesar $ 200 juta, dan di Vietnam tahun 2017 sebesar

$ 170 juta.

Biaya penyelenggaraan event tersebut justru lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pertemuan ekonomi lainnya seperti pertemuan *IMF-World Bank* yang juga dilaksanakan setiap tahun, padahal *event* tersebut dihadiri sebanyak 189 negara. Adapun besarnya biaya penyelenggaraan event tersebut dalam empat pertemuan terakhir yaitu $ 183 juta pada pertemuan di Peru, $ 121 juta di Jepang, $ 111 juta di Turki, dan $ 102 juta di Singapura.

Maka dari itu, penting bagi negara untuk mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menjadi penyelenggara KTT *APEC*, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Kegagalan dalam memanfaatkan peluang yang ada pada event tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi negara tersebut seperti pemasukan yang tidak sebanding dengan pengeluaran pada event tersebut atau pun utang yang melonjak sementara investasi yang dihasilkan minim.

Namun pada dasarnya, setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak atas dasar kepentingan dirinya sendiri dalam pembuatan kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan nasionalnya. Negara dalam menentukan kebijakannya tidak terlepas dari rasionalitasnya, yaitu pertimbangan terhadap keuntungan dan kerugian dari alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat. Adanya pertimbangan tersebut bertujuan agar kepentingan nasional yang ingin dicapai dapat diraih secara

maksimal.

Tercapainya penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 di Papua Nugini pun tidak terlepas dari adanya proses pengambilan keputusan dari Pemerintah Papua Nugini dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penyelenggaraan tersebut. Keputusan tersebut di satu sisi menimbulkan keuntungan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kerugian. Dalam membuat keputusan tersebut, posisi Pemerintah Papua Nugini memang dilematis, Papua Nugini dihadapkan oleh dua opsi kebijakan yang bisa diambil, yaitu kebijakan untuk tetap menyelenggarakan KTT *APEC* 2018 dan kebijakan pembatalan KTT *APEC* 2018 di negara tersebut.

Ada 2 kepentingan yang menjadi dasar pertimbangan Papua Nugini dalam memutuskan untuk tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018. Adapun dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Dilihat dari *value maximazing*, pencapaian dua kepentingan tersebut memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan biaya penyelenggaraan *event* tersebut.

# Kepentingan Ekonomi

Salah satu pertimbangan eksternal Papua Nugini memutuskan untuk menjadi tuan rumah KTT *APEC* ialah melihat kesuksesan penyelenggaraan KTT *APEC* di negara lain sebelumnya, seperti di Filipina dan Vietnam. Penyelenggaraan KTT *APEC* di kedua negara tersebut memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ekonominya. Tentu Papua Nugini mengharapkan hal yang sama bisa dicapai oleh negaranya.

Dalam memutuskan menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018, Papua Nugini tidak hanya melihat faktor eksternal saja, namun mempertimbangkan juga faktor internal. Kebutuhan akan investasi asing untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional seperti minimnya infrastruktur, rasio diversifikasi ekonomi yang rendah, merosotnya pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir sebelum penyelenggaraan KTT *APEC* 2018, dan persoalan ekonomi lainnya menjadi alasan internal Papua Nugini dalam memutuskan untuk tetap menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018.

Secara ekonomi, penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 dapat memberikan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam hal jangka pendek, kedatangan 15.000 peserta yang terdiri dari delegasi, investor, LSM, pengamat, wartawan dan lain-lain memberikan peluang pada meningkatnya sektor pariwisata, meningkat dan berkembangnya sektor UMKM, serta menghasilkan pendapatan yang berasal dari pengeluaran para peserta selama KTT *APEC* berlangsung.

Pendapatan dari biaya peserta KTT *APEC* mencapai $ 76 juta yang kemudian berkontribusi pada meningkatnya cadangan devisa yang dimiliki oleh Papua Nugini pada tahun 2018 menjadi $ 2,23 miliar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar $ 1,76 miliar.

UMKM menjadi sektor potensial yang berusaha ditingkatkan oleh Papua Nugini selama kegiatan KTT *APEC* berlangsung. *APEC* telah memberikan fasilitas kepada setiap tuan rumah KTT *APEC* untuk mengekspos keunggulan UMKM yang dimiliki. Melalui fasilitas tersebut, para wirausahawan dapat membangun jaringan dan berinteraksi dengan para investor dari negara-negara anggota *APEC* untuk mendapatkan pasar. Tercatat ada 74 UMKM yang berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan selama event berlangsung di berbagai lokasi pertemuan.

Untuk mencapai hal tersebut, KTT *APEC* 2018 menghasilkan suatu platform yaitu *Real Impact*, platform ini berupa situs web yang memberikan akses kepada UMKM ke pasar *regional* dan global. Dalam situs web tersebut, para UMKM dapat menampilkan produk-produk yang dihasilkan terutama dari produksi penduduk pedesaan Papua Nugini. Selain itu, *Real Impact* juga menyediakan pinjaman tanpa bunga kepada para

UMKM senilai $ 50.000. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para UMKM di Papua Nugini untuk mengembangkan produknya.

Kehadiran 15.000 peserta penyelenggaraan KTT *APEC* juga memberikan kesempatan pada peningkatan sektor pariwisata Papua Nugini, event tersebut diharapkan dapat mendongkrak tingkat kunjungan wisman yang tertinggal dari negara- negara tetangga di Kawasan Pasifik Selatan. Selain itu kehadiran media dari 20 negara anggota turut memberikan kontribusi dengan mengekspos keberagaman destinasi wisata yang ada di Papua Nugini. KTT *APEC* 2018 tidak hanya memberikan kesempatan pada industri pariwisata di ibukota Papua Nugini, tetapi juga di provinsi lain.

Penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 mampu meningkatkan kunjungan wisman ke Papua Nugini di tahun 2018 yaitu sebanyak 194.000 kunjungan, meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2017. Selain itu penerimaan dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan dari 670 juta Kina di tahun 2017 meningkat menjadi 700 juta kina di tahun 2018. Setelah sukses mempromosikan pariwisatanya melalui KTT *APEC*, Papua Nugini kemudian memacu peningkatan jumlah wisman dengan memberlakukan bebas visa terhadap 20 negara anggota *APEC*. Hal ini pun berpengaruh pada penyebaran demografi wisman yang berkunjung, adapun kawasan yang menjadi penyumbang jumlah wisman terbanyak ke Papua Nugini pada semester pertama 2019 yaitu Australia sebesar 48%, Asia Tenggara menyumbang 12%, Asia Timur 10%, Eropa 8%, Amerika dan Selandia Baru masing-masing 7%.

Adapun hambatan terbesar pada sektor pariwisata yaitu potensi tempat-tempat wisata tersebut belum dikembangkan secara maksimal dan juga infrastruktur pendukung yang terbatas, Sektor pariwisata Papua Nugini masih tertinggal dari negara-negara Kawasan Pasifik Selatan lainnya seperti Fiji yang meraup pangsa pasar pariwisata di Pasifik Selatan sebanyak 41% dan Vanuatu sebesar 34%. Sementara itu dalam skala global, Papua Nugini menempati peringkat terakhir sebagai negara yang meraup keuntungan ekonomi terbesar dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata hanya berkontribusi sebesar 2,1% terhadap PDB Papua Nugini. Hal ini membuat Papua Nugini juga menjadikan KTT *APEC* sebagai momentum untuk mempromosikan peluang-peluang investasi di sektor pariwisata kepada para investor dari negara-negara anggota *APEC*, terutama pada pengembangan infrastruktur pendukung dan akses transportasi yang menjadi alasan rendahnya tingkat kunjungan wisman.

Penyelenggaraan KTT *APEC* diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Papua Nugini dengan masuknya investor untuk berinvestasi khususnya di bidang infrastruktur, mengingat kondisi infrastruktur Papua Nugini yang memprihatinkan. Keinginan Papua Nugini menjadi tuan rumah KTT *APEC* telah mendatangkan banyak investasi dari negara-negara anggota *APEC* untuk mendukung suksesnya pelaksanaan KTT *APEC*. Selain itu, melalui penyelenggaraan KTT *APEC*, para investor dari negara-negara anggota *APEC* yang datang dapat melihat secara langsung kebutuhan investasi di Papua Nugini. Dengan demikian, Papua Nugini dapat memanfaatkan kedatangan para investor tersebut untuk mempromosikan potensi investasi di bidang infrastruktur.

Sebelum penyelenggaraan KTT *APEC* berlangsung, Papua Nugini telah mendapat manfaat dari event tersebut berupa bantuan yang terdiri dari infrastruktur, pelatihan keamanan, alutsista, dan penyediaan fasilitas lainnya. Adapun Tiongkok dan Australia menjadi negara pemberi bantuan terbesar bagi Papua Nugini dalam menyelenggaraakan *APEC*. Australia menyumbang dana sebesar $ 108 miliar yang sebagian besar biayanya digunakan untuk menjamin keamanan event tersebut. Sedangkan Tiongkok memilih memberi bantuan kepada Papua Nugini berupa pembangunan infrastruktur yang antara lain berupa gedung konvensi internasional senilai $ 35 miliar dan pembangunan jalan

raya senilai $ 40 miliar, Tiongkok juga memberikan program pelatihan keamanan bagi Kepolisian Papua Nugini, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Papua Nugini.

Papua Nugini juga mendapatkan manfaat jangka panjang lainnya dengan tercapainya kesepakatan investasi baik pada saat penyelenggaraan KTT *APEC* berlangsung maupun setelah penyelenggaraan tersebut. Pada saat penyelenggaraan KTT *APEC*, Papua Nugini berhasil membuat kesepakatan investasi di bidang listrik dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Nilai investasi dari negara-negara tersebut dalam pembangunan infrastruktur listrik ini diperkirakan mencapai $ 1,7 miliar, dan Australia menyepakati nilai investasi untuk tahun pertama sebesar $ 18 juta.

Selain elektrifikasi listrik, keterbatasan sistem digital berupa teknologi komunikasi dan konektivitas jaringan internet juga menjadi isu yang diangkat Papua Nugini dalam penyelenggaraan KTT *APEC* 2018. Isu digital bahkan menjadi fokus tema dalam pertemuan tahunan tersebut, melalui KTT *APEC*, Papua Nugini berusaha mendorong negara-negara anggota *APEC* untuk berinvestasi di bidang digital dengan harapan akan meningkatkan kualitas internet dan digital negara tersebut.

Dalam pertemuan KTT *APEC* 2018, Papua Nugini berhasil membuat kesepakatan dengan Australia mengenai investasi kabel serat optik bawah laut, diperkirakan biaya investasi ini menghabiskan $ 100 juta yang dibiayai oleh Pemerintah Australia. Proyek ini dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan koneksi internet untuk masyarakat dan pelaku usaha di Papua nugini sehingga juga diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Papua Nugini.

Kesepakatan investasi antara Papua Nugini dan investor dari negara-negara *APEC* tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan KTT *APEC* , namun juga setelah penyelenggaraan event tersebut. Atas promosi investasi yang dilakukan Papua Nugini, investor asing mulai melirik Papua Nugini sebagai peluang investasi yang menjanjikan. Salah satu contohnya ialah kerjasama yang dibangun Papua Nugini dengan Pemerintah Jepang terkait proyek pengembangan bandara internasional kedua di Papua Nugini yang terletak di Kota Lae senilai $ 185 juta pada tahun 2019.

Selain dalam bentuk infrastruktur, investor yang masuk juga menyasar sektor industri terutama pada sektor industri pertambangan. Pada KTT *APEC*, Papua Nugini dan *China Metallurgical Group Corporation* yang merupakan perusahaan Tiongkok menyepakati *MoU* terkait investasi proyek industri nikel senilai $ 1,5 miliar. Setelah penyelenggaraan KTT *APEC* tepatnya pada Desember 2018, Papua Nugini juga menyepakati *MoU* dengan perusahaan tambang *Newcrest Mining* dan *Harmony Gold* terkait proyek tambang tembaga dan emas Wafi-Golpu senilai $ 5.1 miliar. Kesepakatan lainnya yang dicapai setelah penyelenggaraan KTT *APEC* yaitu ditandatanganinya *MoU* antara Papua Nugini dengan *Total* dengan mitranya *ExxonMobil* dan *Oil Search* pada April 2019 terkait proyek gas alam cair senilai $ 13 miliar.

Investasi asing memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh Papua Nugini dalam mengatasi permasalahan ekonominya, KTT *APEC* merupakan momentum yang sangat memberi manfaat bagi perekonomian, event tersebut memberikan askes langsung bagi Papua Nugini untuk bertemu dengan pemimpin negara anggota *APEC* maupun investor dari negara-negara tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan Papua Nugini secara langsung dengan menggaet investor untuk berinvestasi di Papua Nugini. Untuk memaksimalkan pencapaian investasi tersebut, Papua Nugini telah mengeluarkan kebijakan perdagangan nasional pada tahun 2017 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan penanaman modal asing dan investasi asing di Papua Nugini. Ada beberapa aturan dalam kebijakan ini yang menguntungkan para investor asing yang antara lain yaitu pemberian insentif pajak, perlindungan investasi yang difasilitasi,

diatur, dan dipantau oleh Undang-Undang Promosi Investasi, serta adanya jaminan terkait properti investor asing yang tidak akan dinasionalisasi atau diambil alih kecuali sesuai dengan hukum. Kebijakan tersebut menargetkan tercapainya investasi asing baru senilai $ 10 miliar, peningkatan cadangan devisa, dan ekonomi yang lebih terdiversifikasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan ini menjadi instrumen bagi Papua Nugini dalam mempromosikan peluang investasinya melalui KTT *APEC* 2018. Papua Nugini menjadikan kepentingan ekonomi yaitu berupa manfaat ekonomi jangka pendek dan jangka panjang sebagai goal pada proses pembuatan keputusan berdasarkan model aktor rasional. Permasalahan klasik ekonomi Papua Nugini seperti keterbatasan infrastruktur yang berimbas pada rendahnya tingkat investasi dan rendahnya rasio diversifikasi ekonomi juga menjadi alasan Papua Nugini untuk tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018. Berdasarkan *value maximizing*, keputusan tersebut merupakan keputusan yang rasional, dengan keyakinan bahwa potensi pemasukan yang diperkirakan lebih tinggi daripada pengeluaran, yaitu sekitar $ 2 miliar dibandingkan pengeluaran sebesar $ 1 miliar, selain itu, Papua Nugini juga telah mendapatkan manfaat ekonomi bahkan sebelum penyelenggaraan KTT *APEC* berlangsung dari bantuan negara-negara lain, dan kesuksesan event tersebut juga diyakini dapat mengangkat perekonomian Papua Nugini di masa yang akan datang

dengan masuknya investasi ke negara tersebut.

Hasil dari penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 menunjukkan bahwa Papua Nugini mendapatkan investasi yang masif dari negara-negara anggota *APEC* baik itu sebelum, pada saat, maupun setelah penyelenggaraan.

Gambar 4.1 Jumlah arus masuk investasi asing.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah arus masuk investasi asing yang sangat signifkan terjadi di tahun 2018 yaitu senilai $ 338 juta meningkat dibandingkan pada tahun 2017 yang negatif $ 180 juta, begitu pun arus investasi yang masuk pada tahun 2019 yang tetap tinggi di angka $ 334 juta. Hal tersebut tidak terlepas dari kesuksesan Papua Nugini menyelenggarakan KTT *APEC* yang menghasilkan cukup banyak kesepakatan investasi dengan negara-negara anggota *APEC*. Investasi yang masuk tersebut juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua Nugini di tahun 2019 yaitu sebesar 5,9% meningkat dari tahun 2018 yaitu negatif 0,8%.

Jika mempertimbangkan *value maximizing* secara ekonomi, keputusan Papua Nugini tersebut rasional dan dianggap tepat karena KTT *APEC* berkontribusi terhadap meningkatnya arus investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

Kesuksesan penyelenggaraan KTT *APEC* juga dapat mengurangi permasalahan ekonomi Papua Nugini terutama dalam bidang infrastruktur. Meskipun pembiayaannya didominasi oleh pinjaman luar negeri yang dikhawatirkan akan membuat Papua Nugini terjebak ke dalam perangkap utang negara lain, namun pembangunan infrastruktur yang produktif bagi perekonomian seperti pembangunan jalan, instalasi listrik, dan jaringan internet tentu akan menghasilkan pemasukan bagi negara sehingga dapat digunakan untuk melunasi utang dari pembiayaan investasi tersebut dan juga akan bermanfaat untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kedepannya.

# Kepentingan Politik

Dalam hal politik, Status sebagai tuan rumah sekaligus ketua pada penyelenggaraan KTT *APEC* 2018, membuat Papua Nugini mendapatkan kesempatan untuk memiliki peran yang lebih banyak di bandingkan di KTT *APEC* yang sebelumnya. Sebagai tuan rumah, Papua Nugini dapat terlibat dalam pengaturan agenda pertemuan dengan memasukkan agenda-agenda penting guna mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, KTT *APEC* bisa menjadi momentum bagi Papua Nugini yang merupakan ketua *APEC* tahun 2018 untuk menunjukkan kepemimpinannya melalui penyampaian ide dan pemikirannya terhadap isu-isu perekonomian kepada negara- negara anggota *APEC*.

Salah satu agenda yang diupayakan Papua Nugini agar dibahas di KTT *APEC* ialah agenda terkait ekonomi digital. Papua Nugini berharap pembahasan agenda tersebut dapat menghasilkan suatu kebijakan yang mampu mendorong peluncuran internet berkecapatan tinggi dan murah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian Papua Nugini khususnya untuk meningkatkan jumlah UMKM dari 49.500 pada tahun 2016 hingga mencapai 500.000 UMKM pada tahun 2030.

Agar dilirik oleh investor asing, suatu negara harus memiliki citra yang baik terhadap stabilitas keamanan negaranya. Papua Nugini memiliki stigma yang buruk terkait masalah keamanan. Pada tahun 2018, Papua Nugini hanya menempati peringkat 96 sebagai negara paling aman di dunia. Keamanan selalu menjadi concern bagi Pemerintah Papua Nugini, terutama di ibukotanya yaitu Port Moresby. Kota tersebut pernah dinobatkan sebagai kota paling tidak layak huni di dunia pada tahun 2004 dan seiring dengan peningkatan keamanan, kemudian membaik menjadi peringkat 6 pada tahun 2017. Buruknya tingkat keamanan di Papua Nugini disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang berimbas pada tingginya angka kriminalitas seperti perampokan dan penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di negara tersebut. Faktor lemahnya keamanan tentu saja menjadi hambatan terbesar bagi investor untuk berinvestasi di negara tersebut.

Melalui penyelenggaraan KTT *APEC* 2018, Papua Nugini berusaha memanfaatkan bantuan alutsista dan pelatihan aparat keamanan yang diberikan oleh Australia, Amerika Serikat, Indonesia dan Selandia Baru untuk meningkatkan keamanan negaranya. Papua Nugini juga ingin menunjukkan bahwa negara ini telah mengalami peningkatan keamanan yang cukup signifkan dari tahun ke tahun, sehingga saat ini Papua Nugini relatif aman bagi investor maupun wisatawan yang ingin berkunjung. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Pemerintah Papua Nugini, Isaac Lupari, ia berpendapat bahwa reputasi Port Moresby sebagai kota yang berbahaya telah terbukti salah berdasarkan pengalaman dari 15.000 delegasi KTT *APEC*, ia mengatakan tidak ada satu pun keluhan dari para delegasi tersebut selama penyelenggaraan event.

Keputusan Papua Nugini dalam menjadi tuan rumah KTT *APEC* juga didasari

oleh adanya keuntungan geopolitik yang didapatkan oleh Papua Nugini dengan adanya persaingan antara Tiongkok dan Australia dalam memperebutkan pengaruh di Kawasan Pasifik. Sejak tahun 2006, Tiongkok berusaha meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Pasifik dalam hal diplomatik. Papua Nugini menjadi salah satu sasaran Tiongkok dalam meningkatkan pengaruhnya, hal ini dikarenakan Papua Nugini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam sehingga sangat potensial sebagai tempat investasi, selain itu Tiongkok berupaya mempertahankan dukungan Papua Nugini terhadap Tiongkok di dunia internasional, mengingat dua pertiga negara-negara di Pasifik Selatan mendukung Taiwan yang dianggap Tiongkok sebagai separatis.

Meningkatnya pengaruh Tiongkok di Papua Nugini memunculkan kekhawatiran bagi Australia yang selama ini memegang hegemoni di kawasan tersebut. Hal tersebut membuat Australia berupaya meningkatkan juga pengaruhnya di Kawasan Pasifik termasuk Papua Nugini agar tidak kehilangan hegemoninya di kawasan tersebut.

Persaingan hegemoni tersebut justru menguntungkan Papua Nugini dalam menjadi penyelenggara KTT *APEC*. Sejak menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018 pada tahun 2011, Papua Nugini telah mendapatkan dukungan penuh secara politik dari kedua negara tersebut.

Dengan menguatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan, Papua Nugini berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk memperluas mitra kerjasamanya yang sebelumnya hanya didominasi oleh Australia. Papua Nugini berharap kerjasama dengan Tiongkok dapat membantu menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Papua Nugini, sementara kerjasama antara Australia dan Papua Nugini lebih dominan pada sektor sosial.

Kepentingan politik juga menjadi pertimbangan Papua Nugini dalam memutuskan untuk tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018. Keputusan untuk tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018 juga merupakan keputusan yang logis jika ditinjau dari segi politik, hal ini dikarenakan kesuksesan pencapaian dari kepentingan politik seperti diadopsinya ide-ide berdasarkan kepentingan nasional Papua Nugini oleh *APEC*, pemulihan citra keamanan dan memanfaatkan persaingan hegemoni antara Tiongkok dan Austrlia akan memberikan pengaruh dalam pencapaian kepentingan ekonomi.

Dalam hal politik, keputusan untuk tetap menjadi penyelenggara maupun pembatalan KTT *APEC* 2018 juga memiliki potensi keuntungan dan konsekuensi di masing-masing pilihan. Jika Papua Nugini membatalkan penyelenggaraan KTT *APEC*, konsekuensinya ialah negara tersebut akan kehilangan momentum untuk terlibat dalam agenda-agenda KTT *APEC* guna mencapai kepentingan nasionalnya. Papua Nugini merupakan negara yang lemah secara perekonomian dan kurang berpengaruh di *APEC*, sehingga dengan membatalkan KTT *APEC*, Papua Nugini juga akan kehilangan panggung untuk menunjukkan kepemimpinannya melalui penyampaian ide dan pemikirannya terhadap isu-isu perekonomian kepada negara-negara anggota *APEC*. Selain itu, Papua Nugini juga kemungkinan akan kehilangan momentum dalam memanfaatkan manfaat geopolitik dari adanya persaingan perebutan pengaruh di Kawasan Pasifik Selatan antara Tiongkok dan Australia.

Keputusan Papua Nugini untuk tetap menjadi rumah KTT *APEC* 2018 dinilai tepat berdasarkan *value maximizing* dari alternatif-alternatif keputusan yang ada karena *event* tersebut menghasilkan keuntungan seperti yang telah dijelaskan dan juga merupakan pilihan yang rasional, meskipun keputusan tersebut juga memiliki konsekuensi yaitu jika penyelenggaraan event tersebut tidak berjalan lancar dan menimbulkan permasalahan, tentu saja akan memperburuk reputasi Papua Nugini di dunia internasional.

# Kesimpulan

Penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 merupakan salah satu cara bagi Papua Nugini untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Keputusan untuk tetap menyelenggarakan KTT *APEC* 2018 di tengah krisis ekonomi dan krisis pelayanan masyarakat memang sangatlah dilematis, keputusan untuk tetap melaksanakan maupun membatalkan pelaksanaan KTT *APEC* 2018 tentu memiliki sisi keuntungan dan sisi kerugian di masing-masing pilihan. Adapun jika Papua Nugini membatalkan penyelenggaraan kegiatan tersebut, negara ini dapat menghemat anggaran dan menggunakan anggaran yang terbilang besar tersebut untuk perbaikan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Tetapi kerugiannya adalah, negara ini akan kehilangan momentum untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan politik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebaliknya, jika Papua Nugini tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018, Pemerintah Papua Nugini memang terkesan seperti tidak mempedulikan nasib masyarakatnya yang terimbas krisis ekonomi dan pemotongan anggaran di sektor- sektor vital oleh pemerintah. Namun, Pemerintah Papua Nugini meyakini jika keuntungan yang dihasilkan melebihi biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dan juga akan sangat penting bagi kelangsungan ekonomi Papua Nugini kedepannya. Sehingga Papua Nugini pun akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi penyelenggara KTT *APEC* 2018.

Adapun kepentingan Papua Nugini terhadap penyelenggaraan KTT *APEC* 2018 terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan ekonomi yang ingin dicapai yaitu manfaat ekonomi secara langsung seperti, meningkatnya sektor pariwisata, meningkat dan berkembangnya sektor UMKM, serta menghasilkan pendapatan yang yang berasal dari pengeluaran para peserta selama KTT *APEC* berlangsung. Dan juga manfaat tidak langsung yaitu mendapatkan peluang investasi dari negara-negara anggota *APEC*.

Sedangkan kepentingan politik yang ingin didapatkan oleh Papua Nugini yaitu, Papua Nugini ingin memiliki peran yang lebih besar di *APEC* dan memanfaatkan status tuan rumah untuk untuk mengatur agenda-agenda pertemuan guna mencapai kepentingan nasionalnya. Papua Nugini juga ingin memulihkan dan meningkatkan citranya di dunia internasional khususnya dalam hal keamanan, sehingga Papua Nugini dapat dipandang sebagai tempat tujuan investasi yang aman dan menarik dan yang terakhir yaitu Papua Nugini berusaha memanfaatkan persaingan pengaruh antara Australia dan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan KTT APEC 2018, Papua Nugini berhasil dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ekonomi, kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC terlihat dari masifnya investasi asing yang masuk ke Papua Nugini di tahun 2018 hingga 2019 dan pengaruh dari penyelenggaraan KTT APEC sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Nugini yang negatif 0,8% pada 2018 menjadi 5,9% di 2019.

Dari sisi kepentingan politik, Papua Nugini juga berhasil mencapai kepentingan nasionalnya seperti memperluas mitra kerjasama investasi dan perdagangan dengan negara-negara APEC, menjadikan permasalahan dasar seperti isu digital sebagai agenda utama KTT APEC, dan meningkatkan citra Papua Nugini sebagai negara yang aman bagi investor maupun investasi.

# Daftar Pustaka

Allison. Graham T,1969, “*Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*”, The American Political Science Review, Cambridge: Harvard University.

*APEC promotes PNG’s SMEs* , tersedia di https://[www.apec2018png.org/media/press-](http://www.apec2018png.org/media/press-)

releases/apec-promotes-png-smes.

Bantuan Australia dan Tiongkok untuk KTT *APEC*, tersedia di https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/opportunity-knocks-government- leverages-competing-interests-order-make-most-its-role-host-2018-apec.

Bantuan untuk Papua Nugini dalam menyelenggarakan KTT *APEC*, tersedia di htt[ps://www.dw.com/](http://www.dw.com/en/china-and-australia-compete-for-influence-in-the-)e[n/china-and-australia-compete-for-influence-in-the-](http://www.dw.com/en/china-and-australia-compete-for-influence-in-the-) pacific/a-46332361.

*Boosting digital economy key to developing papua new guineas msmes entrepreneurs*, tersedia di htt[ps://www.businessadvantag](http://www.businessadvantagepng.com/boosting-digital-economy-)e[png.com/boosting-digital-economy-](http://www.businessadvantagepng.com/boosting-digital-economy-) key-to-developing-papua-new-guineas-msmes-entrepreneurs-tell-apec-forum/.

Dampak positiif KTT *APEC* terhadap ekonomi Filipina dan Vietnam, tersedia di https://postcourier.com.pg/hosting-apec-important-png-deepen-trade-investment/ Gambar tingkat jumlah arus masuk investasi asing, tersedia di

htt[ps://www.nord](http://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/papua-new-)e[atrade.com/en/explore-new-market/papua-new-](http://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/papua-new-) guinea/investing?vider\_sticky=oui.

Institute for Economics & Peace. Global Peace Index, 2018, Measuring Peace in a Complex World, Sydney.

Investasi kabel serat optik Australia di Papua Nugini, tersedia di htt[ps://www](http://www.businesswire.com/news/home/20181022006021/en/DataCo-SES-).[businesswire.com/news/home/20181022006021/en/DataCo-SES-](http://www.businesswire.com/news/home/20181022006021/en/DataCo-SES-) Networks-Provide-Broadband-Network-APEC.

Kesepakatan investasi listrik di KTT *APEC* 2018, tersedia di htt[ps://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/18/business/](http://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/18/business/economy-business/u-s-)e[conomy-business/u-s-](http://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/18/business/economy-business/u-s-) allies-including-japan-counter-china-alternative-electricity-plan-papua-new- guinea/.

KTT *APEC* terhadap keamanan di Papua Nugini, tersedia di htt[ps://www.abc.net.au/n](http://www.abc.net.au/news/2018-06-30/security-in-port-moresby-png-issue-)e[ws/2018-06-30/security-in-port-moresby-png-issue-](http://www.abc.net.au/news/2018-06-30/security-in-port-moresby-png-issue-) ahead-of-apec-summit/9920752.

Mas’oed. Mohtar, 1990. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3S.

*MoU signed with China and Ramu Nickel to be expanded*, tersedia di htt[ps://www.peopleconnexion.com/news/ape](http://www.peopleconnexion.com/news/apec-2018-what-s-next-for-)c[-2018-what-s-next-for-](http://www.peopleconnexion.com/news/apec-2018-what-s-next-for-) png/43963/.

*National Trade Policy 2017*, tersedia di htt[ps://www.state.gov/reports/2018](http://www.state.gov/reports/2018-)- investment-climate-statements/papua-new-guinea/.

Papua Nugini terpilih menjadi tuan rumah KTT *APEC* 2018, tersedia di <http://www.pireport.org/articles/2013/10/10/papua-new-guinea-chosen-host-2018-> apec-summit.

Pemangkasan anggaran Papua Nugini, tersedia di https://[www.rnz.co.nz/international/pacific-news/376041/png-health-and-education-](http://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/376041/png-health-and-education-) suffer-in-budget-economist.

*PNG’s visitor arrivals report*, tersedia di https://bucketpng.s3.amazonaws.com/files/s3fs- public/2020-02/2018%20Visitor%20Arrivals%20Report.pdf.

*PNG 2016 budget APEC and public debt*, tersedia di https://[www.lowyinstitute.org/the-](http://www.lowyinstitute.org/the-) interpreter/lingering-questions-pngs-2016-budget-apec-and-public-debt.

*PNG Forex exchanges*, tersedia di https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=PG-ID.

*PNG GDP Growth 2016-2018,* tersedia di [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\_RPCH@WEO/PNG/IDN.](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH%40WEO/PNG/IDN)

*Real Impact*, tersedia di https://[www.businessadvantagepng.com/taking-papua-new-](http://www.businessadvantagepng.com/taking-papua-new-) guinea-artisanship-to-the-world/.